

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap udara dari akibat kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta belum berjalan cukup baik karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi yang masih dibiarkan beroperasi khususnya kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan kendaraan pribadi.
2. Adapun hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap udara dari akibat bertambahnya kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta antara lain:
 - a. Belum adanya regulasi untuk menguji semua kendaraan bermotor yang berkaitan dengan emisi.
 - b. Belum adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang melanggar terkait uji emisi
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk mentaati aturan terkait uji emisi

B. Saran

1. Perlunya regulasi yang bisa menguji semua kendaraan bermotor tidak hanya untuk kendaraan wajib uji tetapi juga kendaraan tidak wajib uji.

2. Perlunya sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kendaraan bermotor yang melanggar batas uji emisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Imam Supardi, 2003 Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Alumni, Bandung.

M Daud Silalahi, 2002 Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Alumni, Bandung.

Muhammad Erwin, 2008 Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT Refika Aditama, Bandung.

Mukono, 2008 Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernafasan, Airlangga, Surabaya.

Sukanda Husin, 2009 Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997

C. Skripsi

Pinky Trecey Wongkar, Skripsi, Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tisa, Skripsi, Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang palsu di Makassar TRADE CENTRE, Universitas Hasanuddin Makassar

D. Data Elektronik

<https://jogja.tribunnews.com/2018/02/26/wow-jumlah-kendaraan-di-kota-yogya-naik-hingga-200>

<https://WWW.google.com/amp/s/www.starjogja.com/2019/06/14/wujudkan-kualitas-udara-bersih-di-Yogyakarta/amp/> diakses 13 oktober 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran udara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Udara>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor)

Unila, 'perindungan hukum', <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>

<https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perindungan-hukum-yang-wajib-diketahui-dasarnya.html>